

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS EKONOMI GLOBAL 2008

Dinie Ariani

Magister Akuntansi Universitas Bengkulu

Fadli

Lismawati

Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu

ABSTRACT

This research aims is to determine whether there are differences between financial performance of local governments in Indonesia at the level of financial independence, financial effectiveness, financial efficiency, and financial activities before and after the global economic crisis 2008. To analyze the financial performance of local governments, the research conducts financial ratio analysis of APBD.

The samples used in this research is local governments in the province of DKI Jakarta, East Kalimantan, Riau, East Java, North Sumatra, Riau Islands, South Sumatra, Central Java, South Kalimantan and Lampung, which are the top ten provinces which have the largest foreign trade value according to the Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) in 2010 and is expected to hit the global economic crisis 2008, and that was published the data of APBD from 2003 to 2012. The analysis instrument used to determine differences between financial performance before and after the global economic crisis of 2008 was the Paired Sample T Test.

The results of research show that there were no differences between the financial performance of the local governments in Indonesia at the level of financial independence and financial effectiveness before and after the global economic crisis 2008. In other hand, there are differences between the financial performance of the local governments in Indonesia at the level of financial efficiency and financial activity before and after the global economic crisis 2008.

Keywords: Financial Performance of Local Government, Financial Independence, Financial Effectiveness, Financial Efficiency, and Financial Activities

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat belakangan ini yang bermula dari krisis kredit perumahan, berdampak pada merosotnya aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia yang mulai dirasakan sejak pertengahan tahun 2007. Dari proyeksi *International Monetary Fund* (IMF), volume perdagangan dunia tahun 2008 menunjukkan penurunan di setiap triwulannya, dimana pada awal tahun 2008 berada pada angka 6,9 persen dan terus merosot hingga menjadi 2,1 persen pada bulan November 2008, bahkan pada bulan Januari 2009 proyeksi pertumbuhan volume perdagangan dunia menjadi negatif 2,8 persen (Bappenas, 2009). Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terutama bagi negara-negara yang perekonomiannya ditopang oleh kegiatan ekspor seperti Cina, Jepang, Korea, dan negara-negara lainnya.

Sebagai suatu negara dengan perekonomian terbuka, stabilitas ekonomi makro Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang bersifat linier dan positif.

Jika perkembangan ekonomi global berlangsung dengan baik, maka akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, dan demikian sebaliknya. Oleh karena itu, tak heran jika krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 ini berdampak pula pada perekonomian Indonesia.

Di negara Indonesia dampak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi global terhadap perekonomian nasional mulai dirasakan pada triwulan keempat tahun 2008, dimana dari data yang dipublikasikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan pertama tahun 2008 yaitu sebesar 6,2 persen, pada triwulan kedua tahun 2008 sebesar 6,4 persen, pada triwulan ketiga tahun 2008 sebesar 6,4 persen, dan pada triwulan keempat tahun 2008 menurun hingga 2,8 persen. Melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan keempat tahun 2008 ini diantaranya disebabkan karena menurunnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa serta perlambatan pertumbuhan investasi yang merupakan sumber utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut.

Tak hanya berdampak pada perekonomian nasional saja, krisis ekonomi global tahun 2008 ternyata juga berdampak pada perekonomian daerah. Dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian daerah antara lain terlihat jelas pada sektor perdagangan serta ketenagakerjaan. Di sektor perdagangan, sampai dengan bulan November 2008, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Lampung yang merupakan sepuluh besar provinsi yang memiliki nilai perdagangan luar negeri terbesar, dengan nilai rata-rata ekspor perbulan mencapai US\$ 11,6 miliar, mulai mengalami penurunan pada bulan Oktober dan November 2008 (Bappenas, 2009). Beberapa sektor yang mengalami penurunan nilai ekspor tersebut dan berpengaruh terhadap menurunnya penerimaan daerah, diantaranya terlihat pada komoditas ekspor perkebunan, industri manufaktur, dan kerajinan tangan (Isdijoso, 2010).

Ditengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, yang diakibatkan adanya krisis ekonomi global tersebut, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Langkah ini dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja ekonomi yang didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh wilayah nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal. Hal ini tentunya akan menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dan masing-masing daerah untuk terus bekerja keras dalam mendukung berbagai langkah tersebut guna mempertahankan dan membangun kekuatan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi.

Selain itu, perekonomian domestik yang kuat, berdaya saing, berdaya tahan, menyejahterakan rakyat serta stabil secara keseluruhan pada dasarnya akan bergantung kepada daerah, terutama karena era otonomi daerah. Dengan kata lain, tingginya daya saing daerah di Indonesia secara keseluruhan akan menjadi ujung tombak daya saing nasional. Sehingga peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat serta pemantapan stabilitas sosial politik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik agar mampu memberikan kinerja yang positif guna mencegah pelemahan perekonomian lebih lanjut akibat dampak yang ditimbulkan dari krisis ekonomi global. (Bappenas, 2012).

Berlatar belakang pada hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008, yang merupakan replikasi dari penelitian Kurniati (2012), dengan beberapa perbedaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah

daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008?, (2) Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efektivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008?, (3) Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efisiensi keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008?, dan terakhir (4) Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat aktivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008, (2) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efektivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008, (3) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efisiensi keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008, dan (4) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat aktivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008.

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama bagi penulis dan para pembaca mengenai perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun arah kebijakan dan menetapkan strategi-strategi yang berkaitan dengan keuangan daerah guna meningkatkan kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Indonesia terutama dalam menghadapi terjadinya krisis ekonomi global.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya (Halim, 2004).

Temuan data BPS (Jawa Tengah dalam angka 2010) menyatakan bahwa pemerintah daerah berekspektasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 menurun sebesar 4,38% serta lebih lambat dari tahun 2008 yaitu sebesar 4,71%, yang diakibatkan adanya pengaruh krisis ekonomi 2008. Dengan demikian, krisis ekonomi 2008 mengakibatkan kinerja keuangan pemerintah daerah pada tingkat kemandirian keuangan daerah sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibanding sebelum krisis ekonomi 2008 (Kurniati, 2012).

Akan tetapi, dalam penelitiannya yang menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kota se-Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008, Kurniati (2012) tidak berhasil membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitiannya, dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008.

Untuk menguji kembali hipotesis yang diajukan dalam penelitian Kurniati (2012), maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Tingkat efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Alokasi anggaran dikatakan efektif jika menyeimbangkan berbagai permintaan dalam pemerintahan, baik dari organisasi sektor publik dan strategi pencapaian tujuan (visi) yang telah ditetapkan (Halim 2004).

Dalam penelitiannya, Kurniati (2012) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk efektivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008, dimana kinerja sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibanding sebelum krisis ekonomi 2008. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efektivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Tingkat efisiensi menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan (Hamzah, 2006 dalam Kurniati, 2012). Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Dalam penelitiannya, Kurniati (2012) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk efisiensi keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008, dimana kinerja sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibanding sebelum krisis ekonomi 2008 pada tingkat efisiensi keuangan daerah. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efisiensi keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tingkat Aktivitas Keuangan Daerah

Aktivitas keuangan daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memperoleh dan membelanjakan pendapatan daerahnya. Dalam hal ini memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan pada belanja modal maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar (Susantih, 2010).

Ardhini (2011) dalam Kurniati (2012) mengungkapkan bahwa pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan.

Kurniati (2012) berpendapat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk aktivitas keuangan daerah sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibanding sebelum krisis ekonomi 2008. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat aktivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Dari populasi ini diambil beberapa sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: *Pertama*, pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Lampung yang merupakan sepuluh besar provinsi yang memiliki nilai perdagangan luar negeri terbesar menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2010 dan diperkirakan terkena dampak krisis ekonomi global 2008. *Kedua*, pemerintah daerah kabupaten/kota dari sepuluh provinsi tersebut yang mempublikasikan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama periode pengamatan, yaitu tahun 2003 sampai dengan 2012 melalui situs: www.djpk.depkeu.go.id.

Adapun variabel yang digunakan adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan dan pembangunan daerah. Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah ini akan dianalisis dengan menggunakan empat indikator kinerja sebagai berikut:

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Sehingga, ketergantungan kepada pemerintah pusat memiliki proporsi yang lebih kecil, dan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi penyelenggaraan pemerintah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan. Rumusan rasio kemandirian keuangan daerah (Halim, 2004) yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian } i = \frac{\text{PAD } i}{\text{Total Pendapatan Daerah } i}$$

Ket: i = seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Selanjutnya kriteria kemampuan keuangan daerah dapat dikategorikan tinggi (pola hubungan delegatif) jika nilai rasio kemandiriannya 75% - 100%, sedang (pola hubungan partisipatif) jika nilai rasio kemandiriannya 50% - 75%, rendah (pola hubungan konsultif) jika nilai rasio kemandiriannya 25% - 50%, dan rendah sekali (pola hubungan instruktif) jika nilai rasio kemandiriannya 0% - 25%.

Efektivitas Keuangan Daerah

Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan. Rumusan rasio efektivitas (Halim, 2004) yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas } i = \frac{\text{Realisasi PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i}$$

Ket: i = seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Semakin besar rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 kriteria nilai efektivitas keuangan daerah dapat dikatakan sangat efektif jika nilai rasionya diatas 100%, efektif jika

nilai rasionya 90% - 100%, cukup efektif jika nilai rasionya 80% - 90%, kurang efektif jika nilai rasionya 60% - 80%, dan tidak efektif jika nilai rasionya kurang dari 60%.

Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output yang sebesar-besarnya (*spending well*). Rasio efisiensi (Hamzah, 2006 dalam Kurniati, 2012) diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi } i = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran } i}{\text{Realisasi Penerimaan } i}$$

Ket: i = seluruh kabupaten/kota di Indonesia

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 kriteria nilai efisiensi keuangan daerah dapat dikatakan sangat efisien jika nilai rasionya kurang dari 60%, efisien jika nilai rasionya 60% - 80%, cukup efisien jika nilai rasionya 80% - 90%, kurang efisien jika nilai rasionya 90% - 100%, dan tidak efisien jika nilai rasionya di atas 100%.

Aktivitas Keuangan Daerah

Aktivitas keuangan daerah adalah bagaimana pemerintah daerah memperoleh dan membelanjakan pendapatan daerahnya. Analisis aktivitas keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keserasian belanja yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar (Susantih, 2010). Selanjutnya pada penelitian ini secara sederhana, rasio keserasian belanja modal tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal } i = \frac{\text{Belanja Modal } i}{\text{Total Belanja Daerah } i}$$

Ket: i = seluruh kabupaten/kota di Indonesia

Selain itu, data yang diperoleh dalam penelitian perlu dianalisis agar dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu perlu ditetapkan teknik analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, juga untuk menguji kebenaran hipotesis. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008 adalah *Paired Sample T Test* dengan menggunakan bantuan aplikasi program komputer yaitu SPSS (*Statistical Package for Social Science*) Versi 16.00.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa data anggaran dan realisasi APBD kabupaten/kota yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui situs: www.djpk.depkeu.go.id. Secara rinci deskripsi data yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Deskripsi Data

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota Tahun 2012	Kabupaten/Kota Sampel
1	DKI Jakarta	6 kabupaten/kota	0 kabupaten/kota
2	Kalimantan Timur	14 kabupaten/kota	2 kabupaten/kota
3	Riau	12 kabupaten/kota	2 kabupaten/kota
4	Jawa Timur	38 kabupaten/kota	18 kabupaten/kota

5	Sumatera Utara	33	kabupaten/kota	1	kabupaten/kota
6	Kepulauan Riau	7	kabupaten/kota	0	kabupaten/kota
7	Sumatera Selatan	15	kabupaten/kota	4	kabupaten/kota
8	Jawa Tengah	35	kabupaten/kota	24	kabupaten/kota
9	Kalimantan Selatan	13	kabupaten/kota	5	kabupaten/kota
10	Lampung	14	kabupaten/kota	0	kabupaten/kota
Total		187	kabupaten/kota	56	kabupaten/kota

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2013

Dari 187 kabupaten/kota yang tercatat selama tahun 2012 dan termasuk dalam sepuluh besar provinsi dengan nilai perdagangan luar negeri terbesar tahun 2008, hanya data anggaran dan realisasi APBD dari 56 kabupaten/kota yang dapat dijadikan sampel, sedangkan 131 kabupaten/kota sisanya merupakan kabupaten/kota hasil pemekaran dan kabupaten/kota yang tidak mempublikasikan secara lengkap data anggaran dan realisasi APBD selama tahun pengamatan 2003 sampai dengan 2012, sehingga tidak dapat digunakan sebagai sampel dan diolah dalam penelitian ini.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berguna untuk mengetahui karakter sampel yang digunakan dalam suatu penelitian. Pada tabel 1.2 berikut ini disajikan rangkuman mengenai statistik deskriptif dari data yang digunakan untuk setiap indikator kinerja periode sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008.

Tabel 1.2 Statistik Deskriptif

Indikator Kinerja	Mean	Minimum	Maksimum
<i>Sebelum Krisis Ekonomi</i>			
-Kemandirian (KMDB)	0.088368	0.0272 - Kab. Musi Banyuasin	0.2190 - Kota Semarang
-Efektivitas (EFKB)	1.244248	0.7550 - Kab. Temanggung	1.6203 - Kab. Tanah Laut
-Efisiensi (EFSB)	0.730602	0.0954 - Kab. Ogan Komering Ilir	1.6987 - Kab. Penajam Paser Utara
-Aktivitas (AKTB)	0.223393	0.0979 - Kota Semarang	0.6038 - Kab. Penajam Paser Utara
<i>Sesudah Krisis Ekonomi</i>			
-Kemandirian (KMDA)	0.088443	0.0311 - Kab. Musi Banyuasin	0.2422 - Kota Semarang
-Efektivitas (EFKA)	1.257909	0.8702 - Kota Samarinda	1.7855 - Kota Madiun
-Efisiensi (EFSB)	0.116166	0.0151 - Kab. Labuhanbatu	0.3557 - Kab. Musi Banyuasin
-Aktivitas (AKTA)	0.164257	0.0862 - Kab. Gresik	0.4463 - Kab. Penajam Paser Utara

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2013

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang diwakili oleh 56 sampel kabupaten/kota pada tingkat kemandirian keuangan daerah rata-rata sebesar 0.088368 atau 8.8368% (periode sebelum krisis ekonomi global 2008) dan sebesar 0.088443 atau 8.8443% (periode sesudah krisis ekonomi global 2008). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari periode

sebelum krisis ekonomi global 2008 ke periode sesudah krisis ekonomi global 2008, akan tetapi masih menunjukkan pola hubungan instruktif (tingkat kemandirian 0% - 25%).

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efektivitas keuangan daerah menunjukkan rata-rata sebesar 1.244248 atau 124.4248% (periode sebelum krisis ekonomi global 2008) dan sebesar 1.257909 atau 125.7909% (periode sesudah krisis ekonomi global 2008). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari periode sebelum krisis ekonomi global 2008 ke periode sesudah krisis ekonomi global, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan termasuk kriteria sangat efektif (tingkat efektivitas 100% - keatas) yang berarti kemampuan pemerintah daerah kabupaten/kota sudah sangat baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efisiensi keuangan daerah menunjukkan rata-rata sebesar 0.730602 atau 73.0602% (periode sebelum krisis ekonomi global 2008) dan sebesar 0.116166 atau 11.6166% (periode sesudah krisis ekonomi global 2008). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari periode sebelum krisis ekonomi global 2008 dengan kriteria efisien (tingkat efisiensi 60% - 80% berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996) ke periode sesudah krisis ekonomi global dengan kriteria sangat efisien (tingkat efisiensi kurang dari 60% berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996) yang berarti pemerintah daerah kabupaten/kota semakin efisien dalam merealisasikan pengeluaran yang dibelanjakan dari penerimaan yang merupakan hasil pengelolaan sumber daya daerah sesuai dengan peruntukannya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat aktivitas keuangan daerah menunjukkan rata-rata sebesar 0.223393 atau 22.3393% (sebelum krisis ekonomi global 2008) dan sebesar 0.164257 atau 16.4257% (sesudah krisis ekonomi global 2008). Persentase rasio aktivitas yang relatif kecil untuk kedua periode ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota belum memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal secara optimal, melainkan lebih diprioritaskan untuk pemenuhan belanja rutin saja, terutama pada periode sesudah krisis ekonomi global 2008.

Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas data dari keempat indikator kinerja berupa kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, dan aktivitas keuangan daerah, dengan uji statistik menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S)* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Hasil Pengujian Normalitas

Indikator Kinerja	N	Kolmogorov - Smirnov	Asymp. Sig. (2-tailed)
<i>Sebelum Krisis Ekonomi</i>			
- Kemandirian (KMDB)	56	1.089	0.186
- Efektivitas (EFKB)	56	0.577	0.893
- Efisiensi (EFSB)	56	0.479	0.976
- Aktivitas (AKTB)	56	1.276	0.077
<i>Sesudah Krisis Ekonomi</i>			
- Kemandirian (KMDA)	56	1.344	0.054
- Efektivitas (EFKA)	56	0.803	0.538
- Efisiensi (EFSA)	56	1.348	0.053
- Aktivitas (AKTA)	56	1.209	0.108

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2013

Dari tabel 1.3, terlihat nilai *Kolmogorov-Smirnov* masing-masing indikator kinerja pada periode sebelum krisis ekonomi global 2008 adalah 1.089 untuk kemandirian keuangan daerah, 0.577 untuk efektivitas keuangan daerah, 0.479 untuk efisiensi keuangan daerah, dan 1.276 untuk aktivitas keuangan daerah. Sedangkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* masing-masing indikator kinerja pada periode sesudah krisis ekonomi global 2008 adalah 1.344 untuk kemandirian keuangan daerah, 0.803 untuk efektivitas keuangan daerah, 1.348 untuk efisiensi keuangan daerah, dan 1.209 untuk aktivitas keuangan daerah. Nilai probabilitas signifikansi setiap indikator kinerja pada periode sebelum maupun sesudah krisis ekonomi global 2008 lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja terdistribusi normal.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan *Paired Sample T Test* dapat dilihat pada tabel 1.4 dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.4 Hasil Analisis Statistik Hipotesis

Indikator Kinerja	T	Sig.
<i>Kemandirian:</i> KMDB – KMDA	-0.310	0.975
<i>Efektivitas:</i> EFKB – EFKA	-0.436	0.665
<i>Efisiensi:</i> EFSB – EFSA	13.441	0.000
<i>Aktivitas:</i> AKTB – AKTA	10.992	0.000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2013

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat hasil pengujian indikator kemandirian keuangan daerah pada dua periode, yaitu periode sebelum krisis ekonomi global 2008 dan periode sesudah krisis ekonomi 2008 menunjukkan nilai t sebesar -0.310 dengan probabilitas signifikansi 0,975. Karena probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan hasil pengujian untuk indikator kemandirian keuangan daerah tidak signifikan. Hal ini berarti hipotesis pertama ditolak, artinya bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kurniati (2012) yang menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah kabupaten kota se-Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008 dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008.

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat hasil pengujian indikator efektivitas keuangan daerah pada dua periode, yaitu periode sebelum krisis ekonomi global 2008 dan periode sesudah krisis ekonomi 2008 menunjukkan nilai t sebesar -0.436 dengan probabilitas signifikansi 0,665. Karena probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan hasil pengujian untuk indikator efektivitas keuangan daerah tidak signifikan. Hal ini berarti hipotesis kedua ditolak, artinya bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efektivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Kurniati (2012) yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk efektivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008.

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat hasil pengujian indikator efisiensi keuangan daerah pada dua periode, yaitu periode sebelum krisis ekonomi global 2008 dan periode

sesudah krisis ekonomi 2008 menunjukkan nilai t sebesar 13.441 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan hasil pengujian untuk indikator efisiensi keuangan daerah signifikan. Hal ini berarti hipotesis ketiga diterima, artinya bahwa terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efisiensi keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kurniati (2012) yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk efisiensi keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008.

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat hasil pengujian indikator aktivitas keuangan daerah pada dua periode, yaitu periode sebelum krisis ekonomi global 2008 dan periode sesudah krisis ekonomi 2008 menunjukkan nilai t sebesar 10.992 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan hasil pengujian untuk indikator aktivitas keuangan daerah signifikan. Hal ini berarti hipotesis keempat diterima, artinya bahwa terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat aktivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kurniati (2012) yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk aktivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, hipotesis pertama yang menyebutkan terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008 ditolak. Artinya, bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008. Kedua, hipotesis kedua yang menyebutkan terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efektivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008 ditolak. Artinya, bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efektivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008.

Ketiga, hipotesis ketiga yang menyebutkan terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efisiensi keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008 diterima. Artinya, bahwa terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat efisiensi keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008, dimana kinerja keuangan sesudah krisis ekonomi global 2008 lebih tinggi dibanding sebelum krisis ekonomi global 2008. Keempat, hipotesis keempat yang menyebutkan terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat aktivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008 diterima. Artinya, bahwa terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat aktivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008, dimana kinerja keuangan sesudah krisis ekonomi global 2008 lebih rendah dibanding sebelum krisis ekonomi global 2008.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca mengenai perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi global 2008, serta juga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun arah kebijakan dan menetapkan strategi-strategi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan melaksanakan kegiatan

pemerintahan yang baik agar mampu memberikan kinerja yang positif guna mempertahankan dan membangun kekuatan perekonomian Indonesia terutama dalam menghadapi terjadinya krisis ekonomi global.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Keterbatasan tersebut seperti banyaknya data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipublikasikan tidak lengkap, sehingga menyebabkan data yang tersedia dianggap kurang mewakili populasi yang ada untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, serta menyebabkan hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini kurang dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Bappenas. 2009. *Penguatan Ekonomi Daerah: Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global*.
- Bappenas. 2012. *Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat*.
- Deegan, C. 2000. *Financial Accounting Theory*. Australia: McGraw-Hill Book Company.
- Departemen Komunikasi dan Informatika. 2008. *Memahami Krisis Keuangan Global, Bagaimana Harus Bersikap*.
- Fitriyanti, et al. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi*. Penelitian Keuangan Akuntansi Sektor Publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri. Bidakara.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- Gray, et al. 1995. *Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of Literature and Longitudinal Study of UK Disclosure*. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol.8, No.2.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendriyadi, Sigit. 2011. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah antara Tahun 2008-2009*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Indriantoro., dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Isdijoso, Widjajanti. 2010. *Memantau Dampak Sosial-Ekonomi Krisis Keuangan Global 2008/09 Di Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU.
- Janur, Martha Yurdila. 2009. *Analisis Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Sesudah Otonomi Daerah*. Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2010*. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.
- Kurniati, Siti. 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Lubis, Silviyani. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Provinsi Sumatera Utara Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan.
- Mahmudi. 2007. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management*. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Andi.

- Nurhayati, Tuti. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009-2011)*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2007. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. 1999. Jakarta.
- Ronald., dan Sarmiyatiningsih. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo*. Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. I, No. 1.
- Rustan. *Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (online) (diakses 14 Desember 2012) tersedia di World Wide Web <http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mechanisme-kontrol-masyarakat.htm>.
- Sekaran, U. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis 1*. (4 th Ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Suharyono. 2007. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya di Jawa Timur*. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Susantih, Heny. 2010. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan*. Tesis Universitas Sriwijaya Palembang.
- Ullmann, A, A. 1995. *Data in Search of a Theory: A Critical Examination of the Realitionship Among Social Performanc, Social Disclosure, and Economic Performance of U.S Firms*. Academy of Management Review, Vol.10, No.3.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 1999. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta.
- www.djpk.depkeu.go.id